



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	:	2016 - 2017
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Internal
Sifat Rapat	:	<i>Courtesy Call</i>
Hari/Tanggal	:	Senin, 10 Oktober 2016
Waktu	:	15.30 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Gedung Nusantara III, Lantai II
Acara	:	1. <i>Courtesy Call</i> dengan Delegasi Parlemen Jerman 2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Ketua BKSAP DPR RI Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf
Sekretaris Rapat Hadir	:	Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Drs. Robert Juheng Purba 1. Thomas Gotthard Gambke, Anggota Parlemen Jerman 2. Erwin Ruddel, Anggota Parlemen Jerman 3. Caren Lay, Anggota Parlemen Jerman 4. Elvira Drobinski Wiess, Anggota Parlemen Jerman 5. Petra Ernstberger, Anggota Parlemen Jerman 6. Juliari Batubara, Wakil Ketua BKSAP DPR RI 7. H. A. Hanafi Rais, SIP, MPP, Wakil Ketua Komisi I DPR 8. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom, Anggota BKSAP DPR RI 9. Dave Akbarshah Fikarno, M.E, Anggota BKSAP DPR RI 10. Nazarudin Kiemas, Anggota BKSAP DPR RI
Sekretariat	:	11. Drs. Saiful Islam, M.Si, Kepala Biro KSAP 12. Drs. Robert Juheng Purba, Kepala Bagian KSB 13. Chairil Patria, M.Si, Kepala Bagian KSR 14. Iis Muldiyanti, S.Sos, M.M, Kepala Sub Bagian Rapat KSB

**KEPUTUSAN / KESIMPULAN**

I. Pendahuluan

Rapat dibuka oleh Ketua BKSAP Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf pada Senin, 10 Oktober 2016 pukul 15.30 WIB.

## II. Kesimpulan / Keputusan

1. Delegasi yang dipimpin oleh Dr. Thomas Gambke, Member of the German Bundestag / Chairman of the Parliamentary Friendship Group for Relations with the ASEAN States, terdiri dari anggota Parliamentary Friendship Group for Relations with the ASEAN States – Parlemen Jerman. Parliamentary Friendship Group for Relations with the ASEAN States memiliki anggota sebanyak 50 orang yang terdiri dari anggota parlemen lintas partai.
2. Ketua Delegasi Jerman menyampaikan bahwa Parlemen Jerman sangat ingin untuk berkontribusi dalam peningkatan kerjasama antar parlemen melalui ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).
3. Selanjutnya Ketua Delegasi Jerman menanyakan mengenai keterlibatan DPR RI terutama dalam proses penganggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ketua BKSAP menyampaikan bahwa Konstitusi Indonesia mengatur bahwa penganggaran merupakan kewenangan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini disampaikan bahwa proses penganggaran di Indonesia sudah sangat terbuka dan pelibatan stakeholder terkait di setiap siklus APBN sangat disarankan.
4. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, menyampaikan bahwa Indonesia pasca-reformasi 1998 telah bertransformasi dari *executive heavy* menuju *legislative heavy*, dimana DPR RI memiliki kekuatan untuk menyetujui/ menolak usulan belanja negara yang diajukan pemerintah. Kekurangan yang masih dirasakan saat ini terkait kurangnya kompetensi di parlemen sehingga dukungan keahlian menjadi satu kebutuhan tersendiri. Terutama mengingat kompetensi anggota legislative yang bervariasi sebagai hasil pemilihan langsung.
5. Hanafi Rais menyampaikan mengenai kerjasama Komisi I DPR dengan Jerman dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk reformasi bidang pertahanan keamanan yang difasilitasi oleh the *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF).
6. Wakil Ketua BKSAP, Juliari Batubara, menyampaikan mengenai rencana kunjungan BKSAP ke Frankfurt dan Berlin terutama dalam rangka mempelajari dampak integrasi ekonomi terhadap perekonomian nasional. Hal ini terutama relevan dengan kondisi ASEAN saat ini yang telah mengikatkan diri kedalam satu komunitas yang diawali dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 31 Desember 2015. Salah satu agenda kunjungan adalah meninjau UMKM di Rhineland Pfalz. Salah satu anggota delegasi Jerman yang berasal dari dapil Rhineland Pfalz menyampaikan *highlight* mengenai UMKM di dapilnya dan menyambut baik kunjungan BKSAP serta berharap dapat membicarakan kemungkinan kerjasama lebih lanjut. Ketua Delegasi Jerman juga menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan meminta BKSAP untuk mengagendakan pertemuan dengan Parliamentary Friendship Group for Relations with the ASEAN States pada saat kunjungan BKSAP ke Parlemen Jerman tanggal 16-21 Oktober 2016.
7. Ketua Delegasi Jerman menyampaikan harapannya untuk kerjasama yang lebih intensif di masa mendatang dan menyampaikan usulan mengenai kelonggaran aturan-aturan spesifik terkait barang impor dari negaranya guna mendukung investasi UMKM Jerman ke Indonesia. Salah satu contoh adalah aturan mengenai L/C (bank guarantee) dan aturan tariff impor untuk minyak pelumas. Sebagai catatan, kriteria UMKM di Jerman adalah bisnis yang memperkerjakan 500 – 2000 karyawan.
8. Saat ini investasi Jerman ke Indonesia difasilitasi oleh EKONID dan Indonesia-German Advisory Group (IGAG). Ketua Delegasi Jerman menyampaikan usulan untuk pembentukan “one stop service”

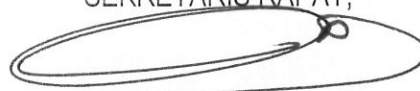
yang dapat memberikan dukungan teknis lebih efektif dikarenakan fungsi EKONID yang terbatas pada konsultasi. BKSAP menyampaikan bahwa BKPM saat ini telah memiliki layanan one stop service untuk perizinan investasi.

9. Selanjutnya dibahas mengenai integrasi Uni Eropa dan upaya strategis Jerman dalam menjamin keterwakilan kepentingan warganegaranya dalam proses penyatuan tersebut. Delegasi Jerman mengakui bahwa high level integrasi Uni Eropa berperan penting dalam kemajuan ekonomi Jerman, termasuk di dalamnya proses penyeragaman mata uang bersama. Integrasi Uni Eropa tidak berarti negara-negara anggota kehilangan hak untuk menyuarakan aspirasi warganegaranya karena proses pembentukan UU Uni Eropa yang mengakomodasi usulan UU inisiatif parlemen-parlemen anggota Uni Eropa. Disinggung pula mengenai sektor pertanian yang tidak lagi kompetitif karena Jerman harus mengadopsi Common Agricultural Policy (CAP) dan menerapkan *Single Payment Scheme* yang membuat *labour cost* petani menjadi mahal. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan Jerman mengembangkan sektor industry dibandingkan pertanian.
10. Menyikapi integrasi ekonomi ASEAN, delegasi Jerman menyampaikan bahwa ASEAN harus melihat lebih detail level integrasi Uni Eropa. Disampaikan pula bahwa perdamaian dan keamanan menjadi prasyarat terpenting bagi kesuksesan integrasi Uni Eropa.
11. Pertemuan membahas pula mengenai isu visa Schengen, dimana saat ini Jerman belum memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor dinas sebagaimana Swiss atau Perancis. Duta Besar Jerman, Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, yang baru bertugas sejak September 2016 menyampaikan bahwa saat ini tengah ada pembicaraan untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik Indonesia. Namun untuk pemegang paspor dinas diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk implementasi fasilitas bebas visa mengingat jumlah pemegang paspor dinas di Indonesia yang sangat besar. Sebagai catatan, anggota Parlemen Jerman berhak memegang paspor diplomatik.
12. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai kemungkinan pembentukan GKSB Jerman – Indonesia. Parlemen Jerman juga mendapat usulan serupa dari Thailand yang menyatakan keinginan membentuk GKSB Jerman – Thailand. Disampaikan bahwa Parlemen Jerman saat ini tengah melakukan perampingan jumlah GKSB sehingga kemungkinan pada periode ini tidak akan terbentuk GKSB Jerman – Indonesia. Mengenai kerjasama DPR RI – Parlemen Jerman menjadi bidang tugas Parliamentary Friendship Group for Relations with the ASEAN States. Dr. Thomas Gambke menyampaikan bahwa Parliamentary Friendship Group for Relations with the ASEAN States akan membentuk 10 sub-group yang terdiri dari 5 orang anggota parlemen untuk focus ke masing-masing negara anggota ASEAN.

### III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 116.30 WIB

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



Drs. Robert Juheng Purba  
NIP. 19620703 199203 1 002